

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram Nusa Tenggara Barat, 2020.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Depok, 2018.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- La Ode Husein, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Social Politics Genius, Makassar, 2019.
- Chrisristoper Lazarski, *Power Tends To Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty*, Cornell University Press, DeKalp Illinois, 2012.
- Extrix Mangkeprijanto, *Trias Politica Catur Pemerintahan Berdaulat, Pidana dan Perdata Terhadap Konstitusi Negara*, Guepedia, Online Publishing (E-Book), 2020.
- Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*, Scopindo Media, Surabaya, 2020.
- Thomas Tokan Pureklolon. *Negara Hukum Dalam Perspektif Pemikiran Politik*. Yogyakarta, Kanisius, 2020.
- A. Sakti Ramdhon. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofos*. Makassar, Social Politics Genius, 2020.
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2019.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hieariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Penerbitan, (E-book), 2021.

Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2015.

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2017.

Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring). Edisi Kelima, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016.

Jurnal:

Slamet Sarwo Edy, "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 6 Nomor 1, 2017.

Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *E-Journal Peradilan Militer*, 2016.

Hadi Supriyanto, "Pemisahan Fungsi Eksekutif Dan Yudikatif", *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 1 Nomor 1, 2004.

Parluhutan Sagala dan Farid Iskandar, "Kedudukan Hakim Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia", *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer*, Volume 5 Nomor 1, 2018.

Kamaruddin, "Otokritik Terhadap Kemandirian Peradilan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Islamica*, Volume 11 Nomor 1, 2014.

Joko Sasmito, "Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer", *Jurnal Perspektif*, Volume 20 Nomor 1, 2015.

Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGN Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2019.

Agustinus PH dan Yuliana Yuli W, "Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 2, 2014.

Bahder Johan Nasution, "Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Volume 7 Nomor 3, 2014.

Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Volume 4 Nomor 2, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 168 K/MIL/2010

Laporan Hasil Penelitian

Caisa Amuliadiga, *Independensi Peradilan Militer Dalam Prinsip Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Letnan Kolonel TNI. Chk. Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada tanggal 12 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, S.H., M.H., Akademisi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, pada tanggal 10 Juni 2022.

Artikel Internet

Dian Erika Nugraheni, “Mahfud MD Ungkap Gejala Hancurnya Sebuah Negara”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/12112401/mahfud-md-ungkap-gejala-hancurnya-sebuah-negara/> diakses tanggal 2 Juli 2022.